

## **Inovasi Daerah Sektor Pariwisata (Studi Kasus Inovasi Pembangunan Pariwisata Kab Purworejo Jawa Tengah)**

**Agus Bahrudin**

[agusblitbang@yahoo.co.id](mailto:agusblitbang@yahoo.co.id)

### **Abstract**

*With the ongoing reformation and now with the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government, the regional development is directed to several development policies that describe the change of development and regional development as well as the management of financing through the reorganization of government institutions and local officials in carrying out their duties and functions in order to realize the implementation of democratic and decentralized development*

*Innovation becomes a necessity that needs to be done so that the existence of government becomes meaningful. The hallmark of successful innovation is the creation and utilization of new processes, new products, new services and new delivery methods, resulting in significant improvements in efficiency, effectiveness and quality being meaningful to the public.*

*Innovation of tourism becomes a necessity that must be done by local government in the development of investment and increase of regional income. In the development of tourism district Purworejo has been able to prepare a master plan for tourism development. Aspects used in the development of tourism include the marketing of the potential of tourism, management of tourism potential, development of tourism destinations, the development of tourism marketing, and the development of the tourism industry*

*Keywords: Innovation, local, development, tourism*

### **A. Pendahuluan**

Dengan bergulirnya reformasi dan saat ini dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan daerah diarahkan kepada beberapa kebijakan pembangunan yang menggambarkan perubahan pembangunan dan pengembangan daerah serta pengelolaan pembiayaan melalui penataan kembali kelembagaan pemerintahan dan aparat daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya agar terwujud penyelenggaraan pembangunan yang demokratis dan desentralistis. Oleh karena itu

daerah dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi dan sumber pendapatan daerah. Ciri inovasi daerah yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas menjadi bermakna di mata publik

Pariwisata merupakan salah satu bidang potensi dan sumber pendapatan yang dapat dikembangkan daerah. Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan

dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996;99)

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan makmur, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan. Dan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana tersebut diatas yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Akhwan Nor 2010 : 20 dan 22).

Adanya penetapan UU Pariwisata oleh pemerintah, semua daerah yang ada di Indonesia melalui dinas pariwisata setempat mengembangkan dan melakukan pembangunan terhadap potensial yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai obyek wisata. Pemerintah daerah dalam menarik perhatian dan minat kunjungan masyarakat, baik melalui swasta maupun pemerintah membangun semua fasilitas. seperti pembangunan fasilitas pantai, pembangunan hotel atau penginapan, pembangunan jalan, pengadaan transportasi laut dan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung. serta melakukan berbagai macam promosi. agar obyek wisata ditempat tersebut mendapat pengunjung dan layak

dijadikan sebagai obyek wisata unggulan. Bagi daerah yang dijadikan sebagai obyek wisata, juga akan menghasilkan devisa bagi negara.

Inovasi menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan daerah agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna. Dalam melakukan pembangunan diperlukan kreativitas daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya salah satunya melalui sektor pariwisata. Namun dalam pengembangan pariwisata tersebut seringkali dilakukan kurang optimal dan tidak sesuai dengan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di daerah. Oleh karena itu daerah perlu menyusun visi, misi dan rencana induk pengembangan pariwisata daerah agar pengembangan pariwisata daerah semakin terarah sesuai dengan kebijakan dan regulasi pemerintah.

Dalam pengembangan potensi pariwisata daerah diharapkan mampu melakukan inovasi melalui penyusunan rencana induk pengembangan pariwisata. Apa sebenarnya rencana induk pengembangan pariwisata (RIPP) dan bagaimana peran RIIP bagi pembangunan pariwisata? Bagaimana pula inovasi yang dilakukan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dalam pengembangan potensi pariwisata?

## **B. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Provinsi Jawa Tengah**

### **Tahun 2012-2017**

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata/Kepariwisataannya (RIPP/RIPK) ini adalah sebagai dokumen panduan atau dokumen induk baru yang membahas potensi pariwisata secara menyeluruh, memuat konsep pengembangan yang fokus, strategi yang terarah, prioritas yang sistematis, menyesuaikan dengan regulasi yang baru dan adanya kepastian hukum tentang perencanaan pengembangan kepariwisataannya. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017 sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012 dijabarkan dalam pembangunan kepariwisataannya provinsi yang meliputi :destinasi kepariwisataannya, pemasaran pariwisata, industri kepariwisataannya, kelembagaannya kepariwisataannya

Visi pembangunan kepariwisataannya Provinsi Jawa Tengah adalah Terwujudnya Jawa Tengah sebagai Destinasi Pariwisata Utama.

Sedangkan misi untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

1. destinasi pariwisata memiliki keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah pencapaian, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
2. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis dan

bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

3. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya.
4. organisasi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataannya berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataannya Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab.
3. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. mengembangkan lembaga pariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.

### C. Destinasi Wisata Unggulan Jawa Tengah

Berdasar arahan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Jawa Tengah, perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi terbagi menjadi: 1) Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), 2) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSSP), 3) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP)

Perwilayah pembangunan DPP terdiri dari 6 DPP yang tersebar di 35 kabupaten/kota yaitu : 1) DPP Nusakambangan-Baturraden dan sekitarnya, 2) DPP Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya, 3) DPP Solo-Sangiran dan sekitarnya, 4) DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya, 5) DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, 6) DPP Rembang-Blora dan sekitarnya.

DPP Nusakambangan-Baturraden dan sekitarnya terdiri dari 2 KSPP dan 3 KPPP, meliputi : 1) KSPP Baturraden dan sekitarnya, 2) KSPP Cilacap-Nusakambangan dan sekitarnya, 3) KPPP Karst Kebumen dan sekitarnya, 4) KPPP Serayu dan sekitarnya, 5) KPPP Purbalingga dan sekitarnya. DPP Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya terdiri dari 4 KSPP dan 4 KPPP, meliputi : 1) KSPP Karimunjawa dan sekitarnya, 2) SPP Semarang Kota dan sekitarnya, 3) KSPP Gedongsongo-Rawapening dan sekitarnya, 4) KSPP Demak Kudus dan sekitarnya, 5) KPPP Kendal dan sekitarnya, 6) KPPP Jepara dan sekitarnya, 7) KPPP Purwodadi dan sekitarnya. DPP Solo-Sangiran dan sekitarnya terdiri dari 2 KSPP dan 3 KPPP, meliputi : 1) KSPP Sangiran dan sekitarnya, 2) KSPP Solo Kota dan sekitarnya, 3) KPPP Cetho

Sukuh dan sekitarnya, 4) KPPP Wonogiri dan sekitarnya, 5) KPPP Tawangmangu dan sekitarnya. DPP Borobudur-Dieng dan sekitarnya terdiri dari 4 KSPP dan 2 KPPP, meliputi : 1) KSPP Borobudur-Mendut-Pawon-Magelang Kota dan sekitarnya, 2) KSPP Prambanan-Klaten Kota dan sekitarnya, 3) KSPP Merapi-Merbabu dan sekitarnya, 4) KSPP Dieng dan sekitarnya, 5) KPPP Purworejo dan sekitarnya, 6) KPPP Kledung Pass dan sekitarnya. DPP Tegal Pekalongan dan sekitarnya terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP, meliputi : 1) KSPP Tegal dan sekitarnya, 2) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya, 3) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya, 4) KPPP Batang dan sekitarnya, 5) KPPP Pemalang dan sekitarnya, 6) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. DPP Rembang Blora dan sekitarnya terdiri dari 1 KSPP dan 2 KPPP, meliputi : 1) KSPP Rembang dan sekitarnya, 2) KPPP Blora dan sekitarnya, 3) KPPP Cepu dan sekitarnya

Berdasar kondisi kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah diklasifikasikan menjadi :

1. Daya tarik unggulan (Gambar 0-1)
2. Daya tarik unggulan yang perlu sentuhan (Gambar 0-2)

### D. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031

Penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten sebagai kawasan agrobisnis yang

maju dan lestari berbasis pertanian dan didukung pengembangan sektor bahari.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi:

1. perwujudan dan peningkatan peran sektor pertanian dan bahari sebagai sektor basis pengembangan wilayah;
2. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusatpusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana wilayah;
4. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mandiri, produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian nasional;
6. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Perwujudan dan peningkatan peran sektor pertanian dan bahari sebagai sektor basis pengembangan wilayah dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1. mengembangkan kawasan agropolitan;

2. mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. mengembangkan potensi kawasan pesisir Selatan Kabupaten;
4. mengembangkan aktivitas perikanan tangkap di wilayah lautan Kabupaten;
5. mengembangkan sektor pendukung pertanian dan bahari.

Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusatpusat pertumbuhan ekonomi wilayah dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1. mengembangkan kawasan perkotaan dan pusatpusat pertumbuhan baru;
2. mengembangkan pusatpusat pelayanan lingkungan perdesaan;
3. menjaga interaksi saling menguntungkan antar pusatpusat pertumbuhan ekonomi wilayah.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan sarana prasarana wilayah dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan sarana transportasi di seluruh kecamatan secara terpadu;
2. meningkatkan jaringan energi berupa pengembangan pemanfaatan sumber daya energi alternatif terbarukan;
3. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan prasarana dan sarana telekomunikasi dan informatika;

4. meningkatkan dan memperluas layanan jaringan prasarana sumber daya air secara terpadu;
5. mengupayakan keamanan pada keberadaan jaringan transmisi dan distribusi minyak yang melalui Kabupaten;
6. meningkatkan kualitas jaringan prasarana lingkungan berbasis mitigasi bencana; dan
7. meningkatkan kualitas sarana pelayanan publik di seluruh kecamatan secara terpadu.

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan sekitarnya yang mempunyai kecenderungan mengurangi fungsi lindung kawasan;
2. mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
3. mengembangkan kegiatan budidaya yang bersifat konservatif dan tidak terbangun di sekitar kawasan lindung;
4. mengembalikan kondisi kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi;
5. membatasi alih fungsi peruntukan lahan disesuaikan dengan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan; dan

6. mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup.

Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian wilayah yang mandiri, produktif, efisien dan berdaya saing dalam perekonomian nasional dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
2. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis pada potensi sumberdaya alam dan kegiatan budi daya unggulan; dan
3. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kawasan sebagai penunjang pengembangan ekonomi kawasan.

Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dilaksanakan dengan strategi meliputi:

1. melestarikan keaslian kondisi lingkungan di dalam dan sekitar KSK dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
2. melestarikan situs dan benda cagar budaya.

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas: kawasan pariwisata budaya; kawasan pariwisata alam; dan kawasan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata budaya berupa situs, makam, bangunan, dan kawasan cagar budaya meliputi: Kecamatan Banyuurip; Kecamatan Purworejo; Kecamatan Kutoarjo; Kecamatan Bagelen; Kecamatan

Bener;Kecamatan Butuh;Kecamatan Loano; danKecamatan Purwodadi.Kawasan pariwisata alam berupa goa, air terjun, pantai, dan pemandangan alam lainnya meliputi:Kecamatan aligesing;Kecamatan Pituruh;Kecamatan Kemiri;Kecamatan Bruno;Kecamatan Purworejo;Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Ngombol; danKecamatan Grabag.

Kawasan pariwisata buatan meliputi:Kawasan Geger Menjangan meliputi:Kecamatan Purworejo; dan Kecamatan Loano.Desas Wisata Somongari di Kecamatan Kaligesing;Desa Wisata Jatimalang di Kecamatan Purwodadi;Desa Wisata Keburuhan di Kecamatan Ngombol;Desa Wisata Ketawangrejo di Kecamatan Grabag;Desa Ekowisata Karangrejo di Kecamatan Loano;Desa Wisata Wirun di Kecamatan Kutoarjo;Desa Wisata Hutan Mayungsari di Kecamatan Bener;Bumi Perkemahan Argoputro di Kecamatan Purworejo; dan kawasan lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata.

## **E. Inovasi Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Purworejo**

Kemunculan inovasi dalam pemerintahan merupakan respon terhadap perubahan-perubahan yang dibawa oleh berkembangnya globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi kemunculan inovasi bukanlah sebuah kesengajaan tapi merupakan bagian dari upaya untuk merekonstruksi penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berorientasi pada kepentingan publik. Terdapat 5 elemen inovasi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo, yaitu :

## **1. Pola Pemasaran Potensi Pariwisata**

### **a. Paket Kunjungan Wisata**

Pola pemasaran potensi wisata di Kabupaten Purworejo merupakan kelanjutan dari pola pengembangan jalur/arus wisata yang direncanakan. Dalam pelaksanaan, selain pengembangan mengembangkan paket wisata di dalam Kabupaten Purworejo juga melakukan kerjasama dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Kebumen, sehingga Purworejo menjadi area transit bagi kawasan pariwisata di kabupaten sekitar Purworejo. Selain paket – paket wisata yang telah ditentukan dari travel, ditawarkan beberapa event pariwisata yang ada di Kabupaten Purworejo, yaitu: Upacara Adad Jolen (2 tahun sekali), Jamasan/upacara memandikan pusaka yang disimpan di Museum Tosan dan kirab budaya berdirinya Kabupaten Purworejo.

### **b. Pola Promosi Wisata**

Pola promosi pariwisata di Kabupaten Purworejo terdiri dari:

1. Promosi di dalam Kabupaten Purworejo
  - a. Penyediaan brosur – brosur pariwisata secara silang antar obyek wisata, ditiap obyek wisata sudah diperoleh brosur tentang obyek wisata lainnya
  - b. Penyediaan brosur sarana pariwisata (hotel, rumah makan, tempat informasi pariwisata dan travel biro)
2. Promosi Keluar Kabupaten Purworejo
  - a. Menyebarkan brosur tentang pariwisata Purworejo ke travel biro dan hotel di Yogyakarta,

Magelang, dan kota Linnya seperti Semarang, Jakarta, Denpasar dan lainnya.

- b. Bekerjasama dengan dinas pariwisata di Kota – Kota besar lainnya

3. Promosi Keluar Negeri

- a. Memasukan informasi pariwisata dalam brosur yang berisi paket – paket wisata ke Jawa Tengah – Indonesia melalui travel biro di beberapa kota di luar negeri
- a. Peran serta aktif dinas pariwisata kabupaten dalam stand promosi Indonesia di festival, pecan raya atau even tertentu di beberapa kota du luar negeri.

## **2. Pengelolaan Potensi Kepariwisataan**

Pengelolaan potensi kepariwisataan terdiri dari:

1. Dinas pariwisata kabupaten Purworejo sebagai lembaga yang membatu pelaksanaan peraturan pemerintah di bidang kepariwisataan, harus selalu meningkatkan profesionalisme petugasnya.
2. Pemantapan perananan dinas pariwisata dengan penuangan urusan yang diserahkan padanya kedalam peraturan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi lain yang terkait.
4. Kerjasama antar daerah ditingkat provinsi ataupun nasional dalam bentuk konsultasi dan koordinasi operasional dan integrasi dan sinkronisasi rute pariwisata, pramusisata dan lainnya
5. Program yang dikembangkan terdiri dari:

- a. Lesgislasi/penyerahan urusan
- b. Pemantapan koordinasi
- c. Kerjasama antar daerah
- d. Pendayagunaan dinas pariwisata Kabupaten Purworejo

## **3. Pembangunan Daerah Tujuan Pariwisata**

1. Menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah ;
  - a. Penyusunan Master Plan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
  - b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan UKW dan Daerah Tujuan Pariwisata Unggulan Daerah
2. Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
  - a. Penyusunan Tata Cara / Petunjuk Teknis Penetapan Daerah Tujuan Pariwisata Unggulan Daerah
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Master Plan Pembangunan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
  - c. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah
  - d. Penetapan Perda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
  - e. Penetapan Regulasi tentang Indikasi Program Pembangunan
  - f. Penetapan Regulasi Tentang Tata Bangunan dan Tata

- Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Destinasi Pariwisata Unggulan
3. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat
    - a. Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
    - b. Pembentukan Forum Koordinasi Teknis Kepariwisata
  4. Mengembangkan daya tarik wisata baru di UKW
    - a. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (*mass market*) maupun bagi segmen ceruk pasar (*niche market*) di kawasan yang belum berkembang
    - b. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di kawasan yang belum berkembang
    - c. Fasilitasi pemberian arahan bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan destinasi untuk mewujudkan *community based tourism* di kawasan yang belum berkembang.
    - d. Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan kawasan pariwisata
  5. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan UKW
    - a. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang
  6. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional
  7. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata
  6. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata
    - a. Pengembangan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (*hard - soft attraction*) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (*mass market*) dan segmen ceruk pasar (*niche market*).
    - b. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi
  7. Pengembangan UKW I sebagai kawasan wisata sejarah, budaya, buatan dan belanja; pengembangan UKW II sebagai kawasan bahari dan belanja; pengembangan UKW III sebagai wisata minat khusus, budaya, agrowisata; dan pengembangan UKW IV sebagai wisata minat khusus, budaya, agrowisata
  8. Meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas

- pariwisata dalam mendukung perintisan kawasan pariwisata
- a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif
  - b. Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata
  - c. Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata
9. Mengembangkan prasarana/infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan
- a. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di kawasan pariwisata
  - b. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di kawasan pariwisata
  - c. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di kawasan pariwisata
  - d. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di kawasan pariwisata
  - e. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (*souvenir shop*) di kawasan pariwisata
10. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (*public private partnership*)
- a. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas
  - b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di kawasan pariwisata
11. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan
- a. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola kawasan pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata
  - b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata yang sudah berkembang
12. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan
- a. Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung
  - b. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan

- pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu kawasan pariwisata
13. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan
    - a. Pengembangan skema insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata
    - b. Meningkatkan pengawasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang dapat berdampak negatif bagi lingkungan
    - c. Peningkatan peran dan tanggung jawab swasta dalam pemeliharaan sarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada kawasan pariwisata
  14. Mengembangkan sarana moda transportasi yang menghubungkan antar koridor pariwisata daerah
    - a. Pengembangan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan
    - b. Mengembangkan moda transportasi yang hemat energi dan ramah lingkungan
    - c. Pengembangan angkutan wisata antar koridor pariwisata daerah yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan
    - d. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka mendukung aksesibilitas antar koridor pariwisata daerah
    - e. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka peningkatan kualitas layanan bagi wisatawan
    - f. Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi antar koridor pariwisata daerah
  15. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, yang menghubungkan antar koridor pariwisata
    - a. Pembangunan *shelter* bis pariwisata di tiap-tiap kawasan wisata
    - b. Peningkatan kualitas terminal bis dan angkutan umum
    - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan
    - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas *tourism signage*
    - e. Penambahan Armada Transportasi Bus Pariwisata untuk jalur- jalur tertentu
  16. Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
    - a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan
    - b. Peningkatan intensitas keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan
  17. Mengembangkan Keterlibatan masyarakat dalam pola DMO (destination management organization) dalam pengembangan kepariwisataan
    - a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan

- masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan
- b. Perintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
  - c. Pelatihan dan Pendidikan tentang DMO
18. Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata
- a. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata
  - b. Fasilitasi pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata
  - c. Fasilitasi pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat di bidang pariwisata
  - d. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi
19. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat
  - b. Menyusun regulasi yang mendorong keterlibatan pihak swasta untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui program corporate social responsibility (CSR)
20. Meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai tanah air
- a. Mengembangkan kegiatan study tour pariwisata di kalangan usia sekolah
  - b. Mengembangkan kurikulum lokal berbasis budaya dan sejarah daerah
  - c. Mengembangkan minat baca tulis remaja usia sekolah akan sejarah, seni dan budaya
21. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat
- a. Peningkatan sosialisasi sadar wisata pada masyarakat lokal Satuan Kerja
  - b. Pengembangan media *campaign* pada media massa lokal (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata
  - c. Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapa pesona 2.4. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata
  - d. Pemberian bantuan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan masyarakat lokal di sekitar kawasan pariwisata
22. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sector pariwisata
- a. Penetapan Keringanan Pajak dalam periode waktu tertentu bagi Pengembangan Investasi

- b. Menurunkan tarif pajak daerah yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga/jasa
23. Mengusulkan adanya Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
- a. Penyusunan studi potensi KEK pariwisata
  - b. Kordinasi dengan pemerintah pusat
  - c. Membangun kesamaan persepsi tentang KEK pariwisata dengan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan stakeholder di daerah
24. Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perizinan
- a. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja Satuan Kerja
  - b. Pengurangan jenis peraturan perizinan
25. Mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata
- a. Penyediaan informasi profil investasi daerah
26. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri
- a. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal
  - b. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi
  - c. Pengembangan berbagai marketing kit investasi
  - d. promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet
  - e. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.
- f. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata
  - g. *Road show* promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial
27. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sector terkait
- a. Peningkatan kerjasama lintas sector terkait promosi investasi
- #### 4. Pembangunan Pemasaran Pariwisata
1. Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan
- a. Intensifikasi promosi produk-produk wisata unggulan daerah Satuan Kerja
2. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
- a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui *community marketing* dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.
  - b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal
  - c. Pengembangan bahan promosi secara tematik
3. Akselerasi pergerakan wisatawan
- a. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait

- b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (*community marketing*), melalui:
    - 1) Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (billing, majalah hobi, buletin organisasi, dll).
    - 2) Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).
  - c. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui:
    - 1) Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dll)
    - 2) Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industry pariwisata dengan institusi pendidikan
  - d. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui:
    - 1) Potongan harga terusan (circuit discount)
    - 2) Keuntungan ganda atas jasa tertentu (double benefit)
    - 3) Kartu keanggotaan (traveller/expatriate card)
    - 4) One entry ticket yang berlaku untuk beberapa obyek wisata
4. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dll, )
  5. Mengembangkan dan memantapkan positioning
    - a. Penilaian dan penajaman kembali strategi *positioning* pariwisata Kabupaten Purworejo dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik : Intensifikasi implementasi
    - b. Penilaian dan penajaman kembali strategi *positioning* pariwisata yang fokus pada core tourism products : Culture & Heritage
    - c. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada *brand image* yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan
    - d. Pengembangan media sosial sebagai media komunikasi utama dalam menyebarkan *brand image* daerah
  6. Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata
    - a. Pengembangan *PURWOREJO TOURISM CALL CENTER*
    - b. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media *on-line* dan *off-line* dalam tiga aras yaitu *social*, *mobile*, dan *experiential*.
    - c. Peningkatan kualitas *websites* pariwisata
    - d. Pengembangan *Tourism Cyber Campaign*, melalui:
      - 1) E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll
      - 2) Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)

- 3) Online events (contest, blogging events, dll)
  - e. Pengembangan *linkage* jaringan *e-marketing* pariwisata
  - f. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui online portals
7. Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik
- a. Intensifikasi promosi paket-paket wisata melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat dalam bentuk advertorial
  - b. Intensifikasi promosi wisata melalui program acara televisi dan radio, baik lokal, nasional, dan internasional
  - c. Intensifikasi promosi *printing material* : brosur, leaflet dengan (tema tertentu (Heritage, Culture & Heritage)
  - d. Pendistribusian Kit Promosi dalam bentuk CD, DVD kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah yang diperkirakan memiliki keterkaitan pasar
8. Mengembangkan *EMarketing*
- a. Pengembangan pemasaran dan promosi wisata Kabupaten Purworejo melalui website pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau daya tarik wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara
  - b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (*Facebook, Twitter, Youtube*) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan nusantara dan mancanegara
- c. Pengembangan Tourism Cyber Campaign, melalui:
- 1) E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll
  - 2) Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll)
  - 3) Online events (contest, blogging events, dll)
- d. Peningkatan kualitas websites pariwisata Kabupaten Purworejo melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini e-book, e-brochure
- 1) Pengenalan dan sosialisasi market intelligence untuk segmen wisatawan nusantara dan mancanegara (pembuatan program cerdas melalui website seperti yang sudah disediakan oleh para provider agen perjalanan)
  - 2) Community Marketing dengan melibatkan komunitas hobbies (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (*Gathering, Auto Contest, Konser Amal*, dsb)
9. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah
- a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.

- b. Penguatan promosi bermitra (*co-marketing*) dengan pelaku usaha pariwisata
  - c. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (*ecommerce*) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung
10. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan
- a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab
  - b. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (*host*) dan penerima manfaat.
  - c. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan. (*paperless and recyclable material*)
  - d. Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti pengembangan panduan *does and don'ts, interpretation kit*, dan film iklan *responsible tourism behavior*
  - e. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (*reward*) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata
  - f. Pengembangan pola-pola sanksi (*punishment*) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.
11. Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri
- a. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal melalui Direct Selling atau event-event di pusat perbelanjaan dalam bentuk direct selling - consumer show dan mall promotion di kota-kota besar.
  - b. Mengoptimalkan penggunaan social media marketing (Facebook, Twitter, Youtube) sebagai media komunikasi pemasaran untuk segala segmen dan beragam jenis program promosi wisatawan
  - c. Pengembangan promosi terpadu untuk event pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Daerah (dukungan even daerah)
  - d. Promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet
  - e. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi pariwisata daerah
  - f. Pemberian fasilitas/ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel.
  - g. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri
12. Menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Badan Promosi Pariwisata Jawa Tengah

- a. Pembentukan dan operasionalisasi BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) Kabupaten Purworejo
  - b. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata Kabupaten Purworejo antara BPPD dengan Badan Promosi Pariwisata Jawa Tengah
  - c. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan wisata berkelas nasional dan internasional
13. Memperkuat fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Kabupaten Purworejo di luar negeri
- a. Partisipasi pada event-event / pameran di luar negeri dan dalam negeri dalam rangka mempromosikan pariwisata di Kabupaten Purworejo
  - b. Pengembangan jaringan informasi pariwisata di berbagai lokasi strategis,
  - c. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri
14. 2. Memperkuat fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar negeri melalui VITO (*visitor indonesian tourism officer*)
- a. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan untuk dapat membeli paket wisata secara langsung.
  - b. Menjalin kerjasama promosi pariwisata dengan media cetak dan travel agent luar negeri melalui VITO
- 5. Pembangunan Industri Pariwisata**
1. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata
    - a. Peningkatan sertifikasi seluruh usaha pariwisata di Kabupaten Purworejo
    - b. Peningkatan standardisasi seluruh usaha pariwisata dari level nasional ke internasional
    - c. Peningkatan kemampuan *managerial* dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing internasional
    - d. Peningkatan kualitas hotel di seluruh kawasan
    - e. Peningkatan standard dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf internasional
    - f. Pengembangan sistem *informal booking service* bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Kabupaten Purworejo (bekerjasama dengan provider telekomunikasi)  2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
    - a. Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: *perhotelan*)
    - b. Penetapan penggunaan mata uang rupiah (*price quotation*) dalam penjualan produk wisata di Kabupaten Purworejo
    - c. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri spa lokal
    - d. Pengembangan sistem pendaftaran usaha pariwisata satu atap
  3. Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata
    - a. Pengembangan insentif perizinan untuk melindungi industri pariwisata lokal

- b. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler
  - c. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk UMKM
  - d. Pemberian fasilitas/ ruang display bagi para pengusaha kecil di bidang pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel
4. Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata
    - a. Peninjauan ulang prosedur dan persyaratan pemberian izin pada perusahaan asing agar tidak merugikan usaha pariwisata
  5. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata
    - a. Pengembangan Pusat informasi digital di setiap kawasan wisata berkelas nasional dan internasional
    - b. Pengembangan Jaringan Kerjasama secara *online* antar kawasan pariwisata
    - c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di kawasan pariwisata di Kabupaten Purworejo
  6. Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata
    - a. Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Daerah Purworejo sebagai wadah dan coordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata
  7. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai
    - a. Intensifikasi dan efisiensi badan-badan promosi yang telah ada untuk kembali digunakan sebagai wahana promosi bersama dengan sumber dana yang ditanggung bersama
    - b. Pengembangan dukungan promosi di kawasan strategis
    - c. Pengembangan dukungan promosi di kawasan tertinggal
    - d. Peningkatan program pengembangan kawasan dalam menyalurkan dana CSR dari usaha-usaha pariwisata
    - e. Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata
  8. Mengembangkan pola-pola kerjasama industry lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat
    - a. Peningkatan penyerapan *local content* dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal
    - b. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)
    - c. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata
    - d. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata
  9. Memperkuat implementasi kerjasama dan monitoring serta evaluasi kerja sama antara

- pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat
- a. Pengembangan forum kordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata
  - b. Pengembangan forum kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona
  - c. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi- destinasi pariwisata
  - d. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat
10. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Koridor – Koridor Pariwisata Daerah
- a. Pengembangan dan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata
  - b. Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata
11. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya
- a. Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat
  - b. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya setempat

## Penutup

Inovasi pariwisata menjadi suatu keharusan yang mesti dilakukan pemerintah daerah dalam pengembangan investasi maupun peningkatan pendapatan daerah. Dalam mengembankan inovasi sektor pariwisata perlu berpegang pada RIPP yang memuat materi pokok ketentuan program kepariwisataan, yang juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan objek wisata / kawasan.

Dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten purworejo menggunakan lima komponen inovasi yang dilakukan meliputi pola pemasaran potensi pariwisata, pengeloan potensi pariwisata, pembangunan daerah tujuan pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan industri pariwisata

## Daftar Pustaka

- Bahar dan Marpaung. 2000. *Kepariwisataan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Fandeli, Chafid (Editor). 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisataan Alam*. Yogyakarta: Liberty. Sangkala.2013. *Innovative Governme nt*, Yogyakarta: Capiya Publishing.

